



**TINJAUAN AKUNTANSI PENDAPATAN DAN BELANJA PADA DINAS
KESEHATAN KABUPATEN ALOR TAHUN 2021**

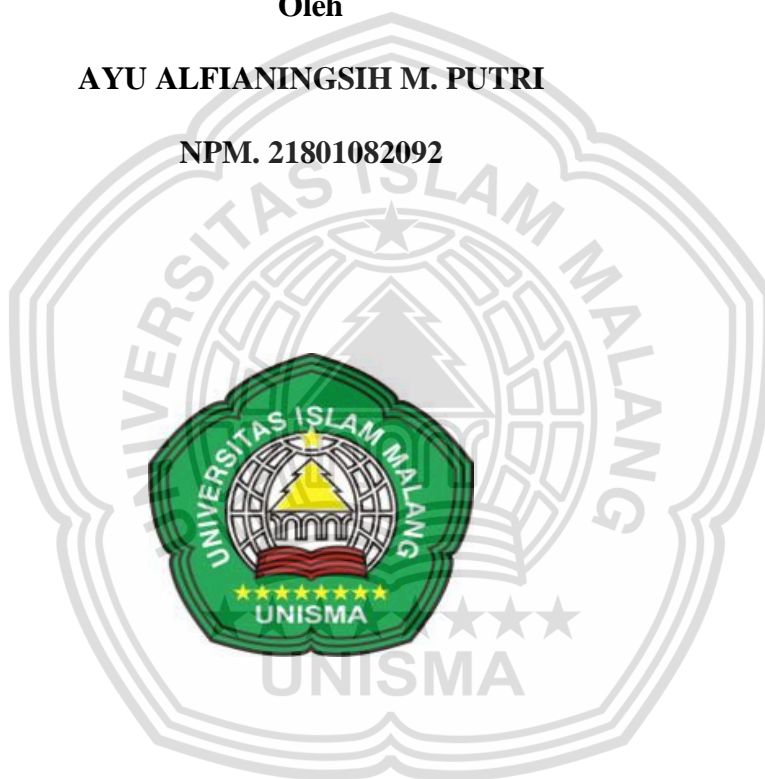
SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Oleh

AYU ALFIANINGSIH M. PUTRI

NPM. 21801082092



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
MALANG
2022**

Abstrak

Dinas Kesehatan Kabupaten Alor merupakan entitas akuntansi yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan harus berdasarkan aturan-aturan standar akuntansi dan peraturan-peraturan yang berlaku seperti dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2020. Tujuan dari penelitian ini untuk meninjau dan menganalisis perlakuan akuntansi pendapatan dan belanja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Alor.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu dengan cara menganalisis data yang terkait dengan perlakuan akuntansi pendapatan dan belanja. Data yang digunakan berupa data primer yang didapatkan dari wawancara dan data sekunder yang didapatkan dari Dinas Kesehatan kabupaten Alor kemudian membandingkan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan peraturan yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya perlakuan akuntansi pendapatan dan belanja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Alor telah sesuai dengan SAP dan peraturan yang berlaku. Namun dalam hal penyajiannya masih ada yang belum sesuai atau masih memiliki kekurangan, hal ini terlihat dari penyajian yang belum lengkap atau kurang rinci dalam menjelaskan pendapatan dan belanjanya.

Kata Kunci: Akuntansi Pendapatan dan Belanja, Dinas Kesehatan, Perlakuan



Abstract

The Alor District Health Office is an accounting entity that manages budgets, assets, and liability reports that carries out accounting and presents financial reports that must be based on accounting standard rules and applicable regulations as in Government Regulation No. 77 of 2020. The purpose of this study is to review and analysis of income and expenditure accounting at the Alor District Health Office.

This study uses a qualitative method with a descriptive approach, namely by analyzing data related to the accounting treatment of income and expenditure. The data used in the form of primary data obtained from interviews and secondary data obtained from the Health Office of Alor district then compare the conformity with Government Accounting Standards (SAP) and applicable regulations.

The results showed that the accounting treatment of income and expenditure at the Alor District Health Office was in accordance with SAP and applicable regulations. However, in terms of the presentation there are still things that are not appropriate or still have shortcomings, this can be seen from the incomplete or less detailed presentation in explaining the income and expenditure.

Keywords: Income and Expenditure Accounting, Health Service, Treatment

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam hal menjalankan otonomi daerah seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 mengenai Perangkat Daerah, menerangkan bahwa daerah otonom yang selanjutnya disebut dengan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan adanya otonomi daerah dalam bidang keuangan, pemerintah daerah memiliki kebebasan untuk mengelola keuangan daerahnya sendiri secara mandiri. Dinas Kesehatan menjadi salah satu Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) dari Pemerintah Kabupaten Alor yang merupakan bagian dalam salah satu penggunaan anggaran. Sebagai sebuah entitas pada unit pemerintahan, Dinas Kesehatan daerah sebagai SKPD yang melakukan pengelolaan dan penganggaran wajib menyajikan informasi keuangan yang bermanfaat bagi para pengguna.

Sebagai organisasi sektor publik yang bergerak dalam bidang kesehatan masyarakat, Dinas Kesehatan menerapkan sistem pencatatan dan pengelolaan yang termasuk di dalamnya yaitu membahas soal keuangan. Dinas Kesehatan Kabupaten Alor dapat dikatakan sebagai pusat biaya dikarenakan ruang lingkup kegiatannya yang mencakup pelayanan kesehatan masyarakat. Hal ini terlihat dengan adanya berbagai program yang dijalankan yaitu seperti, pengelolaan rumah sakit dan puskesmas, penanggulangan penyakit dan penyuluhan tentang kesehatan. Sehingga, pengelolaan terhadap keuangan sangatlah penting dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Alor agar anggaran yang

ditetapkan biasa membiayai semua kebutuhan dari program yang dijalankan serta realisasinya dapat sesuai.

Sering kali permasalahan yang dihadapi oleh instansi daerah terkait pengelolaan keuangan adalah perlakuan akuntansinya. Hal ini dikarenakan masih banyaknya tenaga keuangan yang kurang pengetahuan dalam bidang keuangan karena kebanyakan tenaga keuangan pada pemerintah daerah bukanlah orang yang memiliki dasar pendidikan mengenai keuangan dalam hal ini akuntansi. Sehingga mengakibatkan perlakuan akuntansi sering kali terabaikan.

Dinas kesehatan sebagai entitas akuntansi yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan harus berdasarkan aturan-aturan standar akuntansi dan peraturan-peraturan yang berlaku. Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA) mempunyai wewenang meliputi menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah. Perlu dicatat bahwasannya Instansi kedinasan dalam hal ini dinas kesehatan mereka tidak memperbolehkan semua rincian dari belanja diekspos, yang diperbolehkan hanya meliputi total anggaran, proses pencairan dana dan gambaran besar dari realisasi anggaran.

Mengenai sumber dan peraturan-peraturan untuk dasar penyelenggaraan akuntansi dan penyajian laporan keuangan terdapat banyak sumber dan peraturan yang menjelaskan soal hal tersebut tetapi dalam setiap penjelasan yang diberikan memilih bobot atau pemaparan yang tidak jauh berbeda sehingga dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan beberapa sumber dan peraturan yang penjelasannya lengkap dan memberikan gambaran yang jelas sesuai maksud dan tujuan dari penelitian ini.

Dalam akuntansi terdapat 4 macam standar akuntansi yang berkembang di Indonesia, yang disusun mengikuti perkembangan bisnis di dalam negeri. Berikut ini adalah penjelasan 4 macam standar akuntansi yaitu: PSAK-IFRS (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan-International Financial Report Standard), SAK-ETAP (Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntansi Publik), PSAK Syariah, SAP (Standar Akuntansi Pemerintah). Sebagai entitas akuntansi pemerintah, Dinas Kesehatan di daerah menerapkan standar-standar dalam pencatatan sesuai dengan SAP dan aturan pemerintah terkait.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian perlu dilakukan untuk meninjau perlakuan akuntansi pendapatan dan belanja Dinas Kesehatan Kabupaten Alor. Yang mana hasil tinjauan tersebut disajikan dengan judul: “TINJAUAN AKUNTANSI PENDAPATAN DAN BELANJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN ALOR TAHUN 2021”

2.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana perlakuan akuntansi pendapatan dan belanja Dinas Kesehatan Kabupaten Alor?

3.1 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui perlakuan akuntansi pendapatan dan belanja Dinas Kesehatan Kabupaten Alor.

2.3.1 Manfaat penelitian

1. Manfaat teoritis

Dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi perkembangan ilmu dan penambah bahan bacaan bagi peneliti mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Tinjauan akuntansi pendapatan dan belanja Dinas Kesehatan Kabupaten Alor

2. Manfaat praktis

a. Bagi Peneliti

Dapat menjadi media pembelajaran dan menambah wawasan untuk peneliti sendiri dan para pembaca atau pencari informasi tentang Tinjauan akuntansi pendapatan dan belanja Dinas Kesehatan Kabupaten Alor.

b. Bagi Institusi kesehatan

Sebagai masukan bagi institusi terkait perlakuan akuntansi pendapatan dan belanja Dinas Kesehatan Kabupaten Alor

c. Bagi institusi pendidikan

Dapat digunakan menjadi bahan kajian bagi para mahasiswa dan peneliti diperguruan tinggi dan lembaga lainnya untuk kepentingan penelitian atau mencari informasi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pengumpulan data dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan bagian keuangan Dinas kesehatan Kabupaten Alor mengenai praktek akuntansi pendapatan dan belanja tahun 2021 serta tinjauan terhadap peraturan-peraturan yang terkait, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Klasifikasi pendapatan dan belanja pada Dinas kesehatan Kabupaten Alor telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis pengelolaan Keuangan Daerah, untuk belanja sesuai dengan buletin teknis no 4 tentang penyajian dan pengungkapan belanja pemerintah dan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP).
2. Pengakuan pendapatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Alor telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Buletin Teknis Nomor 23.
3. Pengakuan belanja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Alor telah sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
4. Pengukuran pendapatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Alor telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 02 tentang Laporan Realisasi anggaran.

5. Pengukuran belanja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Alor telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Pusat.
6. Penyajian dan pengungkapan pendapatan, penyajian pendapatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Alor belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) buletin teknis no 23, untuk pengungkapannya Dinas Kesehatan sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) buletin teknis no 23.
7. Penyajian dan pengungkapan, penyajian belanja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Alor belum sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 02, untuk pengungkapannya Dinas Kesehatan sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 02.

5.2 Keterbatasan

Keterbatasan yang dihadapi oleh peneliti sebagai berikut:

1. Terkait dokumen atau data yang ingin dikumpulkan oleh peneliti terdapat kendala yaitu tidak semua laporan keuangan dari instansi dapat di publis sehingga mengurangi kejelasan bukti pada pelampiran bukti data.
2. Peneliti hanya meninjau perlakuan pendapatan dan belanja pada laporan keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Alor pada tahun 2021. Karena keterbatasan waktu sehingga belum dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai laporan keuangan pemerintahan.

5.3 Saran

Berdasarkan simpulan-simpulan yang telah dijelaskan oleh peneliti, saran yang dapat diberikan yaitu sebagai berikut:

1. Karena pada beberapa instansi banyak dokumen atau laporan keuangan yang tidak dapat di publis maka untuk peneliti selanjutnya agar lebih jelas dan lengkap dalam menjelaskan atau memaparkan penjelasan-penjelasan terkait penelitiannya.
2. Waktu penelitian diusahakan lebih maksimal sehingga penelitian yang dilakukan lebih banyak waktu dan menambah kelengkapan dari penelitian yang dilakukan.



DAFTAR PUSTAKA

- A'yun, A. D. Q. (2019). *Perlakuan Akuntansi Persediaan Sesuai Dengan Standar Akuntansi Pemerintah Pada Dinas Kesehatan Kota Batu*.
- AS, A. N. F. (2018). *Tinjauan Yuridis terhadap Penggunaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pendidikan di Provinsi Sulawesi Barat*.
- Faiqoh, N. (2019). *Analisis Akuntansi Keuangan Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) (Studi Kasus Pada Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo)*.
- Fatoni, U. F., & Rianawati, D. T. (2021). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Kota Semarang. *Jurnal Visi Manajemen (JVM)*, 6(3), 1103. <http://stiepari.greenfrog-ts.co.id/jurnal/index.php/JVM/article/view/289>
- Firmansyah, A., Savitri, M. D., Hadi, M., & Hardiana, D. (2015). *Modul Kerjasama Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah: Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*.
https://www.researchgate.net/publication/326377556_Modul_Kerjasama_Peningkatan_Kapasitas_Pengelolaan_Keuangan_Daerah_Akuntansi_Keuangan_Pemerintah_Daerah
- Hamzah, A. p, & Kustiani, N. A. (2014). *Dasar-Dasar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua*l.
- Hantono, Inuzula, L., Husain, S. A., Widiasmara, A., Dhany, U. R., Sululing, S., Novitasari, M., Hendra, J., Amerieska, S., Suryaningsi, Amani, T., Ariyanto, S., Werastuti, D. N. S., & Muchlis, S. (2021). *Akuntansi Sektor Publik* (S. Bahri (ed.)). Media Sains Indonesia.
- Hijriah. (2020). Tinjauan Perlakuan Dan Penyajian Akuntansi Pendapatan Pada Pemerintah Kota Palopo. *Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo*, 6(1).
<https://doi.org/10.35906/JA001.V6I1.542>
- Karima, D., Maslichah, M., & Sudaryanti, D. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemahaman Akuntansi, Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 10(06). <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/10682>
- Karmila, D., Tinangon, J. J., & Gamaliel, H. (2021). Analisis Perlakuan Akuntansi Atas Belanja Modal Pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(1), 668–678.
<https://doi.org/10.35794/EMBA.V9I1.32453>

- Kojongian, C., Sabijono, H., & Pangerapa, S. (2018). Analisis Perlakuan Akuntansi Dan Pelaporan Belanja Barang Dan Jasa Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(03), 581–585. <https://doi.org/10.32400/gc.13.03.20739.2018>
- Komite Standar Akuntansi Pemerintah Buletin Teknis Nomor 14 Tentang Akuntansi Kas. (2013).
- Komite Standar Akuntansi Pemerintah Buletin Teknis Nomor 23. (2017).
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Buletin Teknis Nomor 04 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah. (2006). <http://www.ksap.org/Buletin/bultek04.pdf>
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Buletin Teknis Nomor 23 tentang Akuntansi Pendapatan Non Perpajakan. (2017).
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. (2021).
- Linting, M. (2019). Analisis Perlakuan Akuntansi Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Kantor Pemerintah Kota Makasar. *Economics Bosowa*, 5(003), 240–253. <http://www.economicsbosowa.unibos.id/index.php/eb/article/view/257>
- Motoh, J., Motoh, J. F., Tinangon, J. J., & Warongan, J. D. L. (2020). Analisis penerapan standar akuntansi pemerintahan untuk belanja pada Dinas Kesehatan Kota Manado. *Indonesia Accounting Journal*, 2(1), 44–51. <https://doi.org/10.32400/iaj.27605>
- Mufidah, R. (2020). *Studi Komparasi Sistem Informasi Akuntansi Pengakuan Pendapatan Pada Perusahaan Asuransi Syariah Dan Perusahaan Asuransi Konvensional Bumiputra*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Pusat. (2016).
- Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. (2020).
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (2019).
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi pemerintah. (2010).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (2019).

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah. (2021).*
- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran. (2015).*
- Pernyataan Standar Akuntansi Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran. (2015).*
- Prasongko, D. H. S. (2017). *Tinjauan Atas Akuntansi Belanja Pada KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda Tahun 2017.*
- Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81–95. <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/alhadharah/article/view/2374>
- Sartika. (2019). *Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Intasi Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim.*
- Simbolon, R. A. M., & Budiarmo, N. (2016). Analisis Pencatatan Dan Penyajian Belanja Modal Pada Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara Manado. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/12364>
- Siska. (2017). *Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan.*
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif.* Alfabeta.
- Suryanto. (2019). *Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.*
- Umboh, A. D., & Tinangon, J. J. (2021). Analisis Perlakuan Akuntansi Persediaan PSAP No. 5 Pada Dinas Kesehatan Kota Manado. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(2), 967–974. <https://doi.org/10.35794/EMBA.V9I2.33920>
- Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (2014).*
- Wulandari, M. (2018). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Solok). *Jurnal Akuntansi*, 6(3). <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/3846>

